

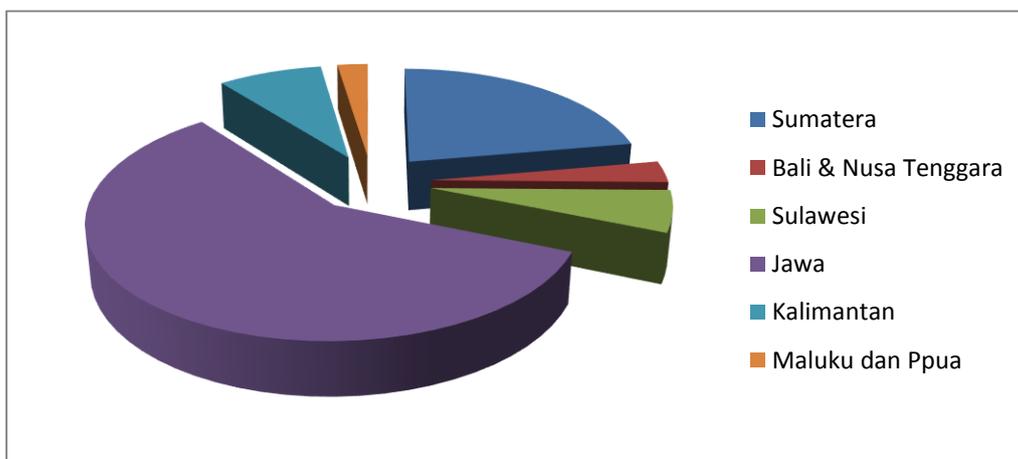
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menjadikan Pulau Jawa sebagai objek penelitiannya. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 Pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Banten. Pulau Jawa merupakan Pulau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 136.610.590 juta jiwa dengan luas wilayah 129.438,28 Km².

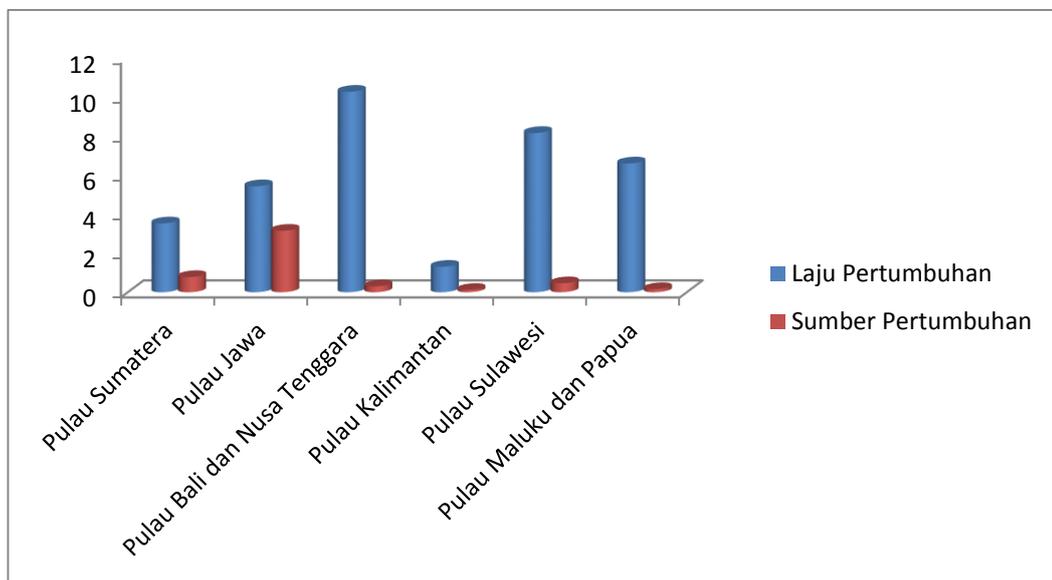
Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok Provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar 58,29%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21%, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,15%. Berikut disajikan Grafik 1.1 mengenai peranan pulau dalam pembentukan PDB Nasional pada tahun 2015.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 1.1
Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Tahun 2015

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian dalam suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan nasional. Berikut Grafik 1.2 mengenai laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB per pulau tahun 2015.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 1.2

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB per Pulau Tahun 2015 (dalam persen)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Laju pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa Tahun 2015 yaitu sebesar 5,45% dan sumber pertumbuhan PDRB Pulau Jawa yaitu sebesar 3,16 %. Berikut disajikan tabel 1.1 mengenai Rincian PDRB Pulau Jawa.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa Tahun 2015

Nama Provinsi	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Ribuan Rupiah)	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Ribuan Rupiah)	PDRB Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)
Jawa Barat	32.651,73	1.525.149,16	25.840,54	1.207.001,49
DKI Jakarta	194.875,22	1.983.420,53	142.868,58	1.454.102,11
Banten	39.977,29	477.936,52	30.778,17	367.959,22
Jawa Timur	43.500,3	1.689.882,52	34.272,86	1.331.418,24
Jawa Tengah	300.25,2	1.014.074,21	23.882,47	806.609,02
DI. Yogyakarta	27.559,28	101.396,4	22.684,71	83.461,57

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Peneliti memilih objek penelitian ini karena penyerapan anggaran belanja modal di Pulau Jawa pada tahun 2014 masih rendah diantara pulau lain, sehingga membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di Pulau Jawa.

1.2 Latar Belakang Penelitian

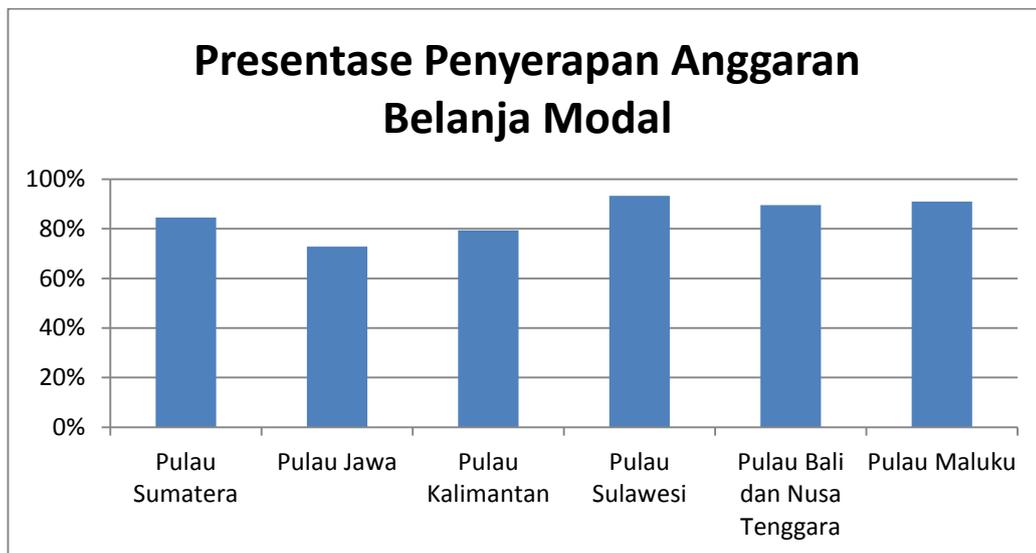
Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterapkannya otonomi daerah baik di Provinsi, Kabupaten/ Kota, diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk lebih menggali potensi-potensi sumber keuangan yang dimiliki pemerintahan daerah tersebut sekaligus dapat mengalokasikan pada belanja daerah sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Apabila pemerintah daerah tersebut dapat menggali potensi-potensi sumber keuangan dengan baik maka akan menyebabkan meningkatnya pendapatan daerah

yang seharusnya dapat diikuti dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang dapat direalisasikan dalam bentuk pengadaan infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Namun, pada kenyataannya penyerapan anggaran belanja modal pemerintah Provinsi pada Pulau Jawa masih rendah kurang dari 85% bahkan tidak mencapai 75%. Padahal belanja modal diharapkan akan membantu pertumbuhan ekonomi. Menurut Kementerian Keuangan seharusnya belanja modal dapat digunakan instansi pemerintah untuk melakukan investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1.3 dibawah ini menunjukkan presentase penyerapan anggaran belanja modal pada enam pulau se-Indonesia pada Tahun 2014.

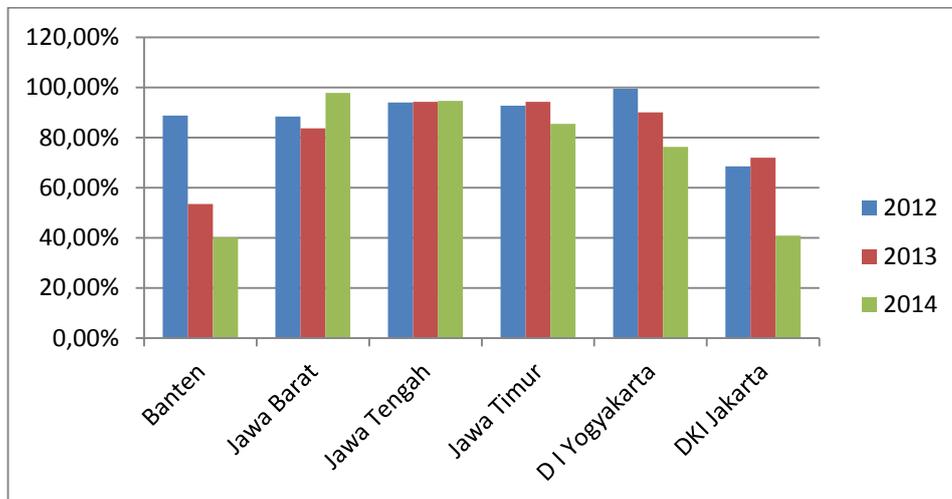


Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 1.3
Presentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal pada 6 Pulau se-Indonesia
Tahun 2014

Berdasarkan grafik 1.3 diatas menunjukkan bahwa Pulau dengan serapan anggaran belanja tertinggi tahun 2014 adalah Pulau Sulawesi sebesar 93,3% kedua tertinggi adalah Pulau Maluku sebesar 90,9% dimana kedua pulau tersebut serapan anggaran belanja modalnya lebih dari 90%. Pulau dengan serapan ketiga tertinggi adalah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 89,5%. Untuk Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa masing-masing sebesar 84,5%, 79,4%, dan 72,8%. Dimana keempat pulau tersebut realisasinya masih kurang dari 90% dan serapan anggaran belanja modal terendah adalah Pulau Jawa dengan 83%.

Pulau Jawa merupakan pulau dengan penyerapan anggaran belanja modal terendah pada tahun 2014. Penyebab penyerapannya rendah karena Provinsi-Provinsi pada Pulau Jawa lebih cenderung mengutamakan belanja pegawai dibanding belanja modal. Berikut grafik 1.4 mengenai penyerapan anggaran belanja modal Pulau Jawa pada tahun selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2012-2014.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 1.4
Presentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal se-Pulau Jawa
Tahun 2012-2014

Berdasarkan grafik 1.4 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 dua provinsi dengan serapan anggaran belanja modal terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten yang masing-masing sebesar 40,8% dan 41,9%. sedangkan provinsi dengan serapan tertinggi yaitu Jawa Barat sebesar 97,8%.

Pada tahun 2013 serapan dengan anggaran terendah yaitu tetap pada provinsi DKI Jakarta dan Banten. Sedangkan pada tahun 2012 serapan terendah yaitu Povinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta lebih mementingkan belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal. Padahal realisasi belanja modal pemerintah sangat penting untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja investasi swasta dan penambahan fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Sedangkan hal yang mempengaruhi rendahnya serapan anggaran belanja modal Provinsi Banten yaitu karena aparat pemerintahnya takut terseret hukum jika menggunakan dana belanja tersebut karena banyak pembangunan proyek-proyek di daerah menjadi target dari aparat hukum karena adanya kasus korupsi.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Redonnyzar Moenek mengungkapkan per Agustus 2015 penyerapan anggaran belanja modal masih sangat rendah, Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan Provinsi yang masuk lima besar dengan serapan anggaran terendah. Lima provinsi itu diantaranya Kalimantan utara dengan 18,6%, DKI Jakarta 19,2%, Papua 21,7%, Jawa Barat 25,2% dan Riau 25,%. Pulau Jawa masih dikatakan rendah dalam penyerapan anggarannya.

Rendahnya penyerapan anggaran belanja modal dalam suatu daerah akan mengakibatkan kurang bagusnya infrastruktur yang sudah ada dan tidak ada penambahan infrastruktur yang signifikan yang menjadikan kurangnya investor yang akan berinvestasi pada daerah yang berpotensi ekonomi tinggi.

Pulau Jawa dengan penduduk terbanyak, pusat pemerintahan dan perekonomian berada di pulau Jawa namun penyerapan anggarannya masih sangat rendah. Berikut grafik 1.5 yang menunjukkan penyerapan anggaran belanja modal Pulau Jawa selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2012, 2013, dan 201



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 1.5
Presentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal Pulau Jawa
Tahun 2012 - 2014

Berdasarkan grafik 1.5 diatas menunjukkan bahwa Pulau Jawa pada tahun 2012 penyerapan anggarannya sebesar 88,6%. Pada Tahun 2013 sebesar 91,1%, mengalami kenaikan. Namun pada Tahun 2014 mengalami penurunan yang drastis yaitu menjadi sebesar 72,80%.

Hal ini bertolak belakang dengan teori yang ada dimana masing-masing variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada setiap provinsi di Pulau Jawa selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berdampak pada meningkatnya anggaran belanja modal, seharusnya dengan terus meningkatnya PAD, DAU, DAK dan diikuti meningkatnya anggaran belanja modal pemerintah provinsi di Pulau Jawa dapat lebih leluasa dalam memanfaatkan anggaran tersebut. Namun, pada penerapannya dengan tersedianya anggaran belanja modal yang tinggi belum mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tersebut.

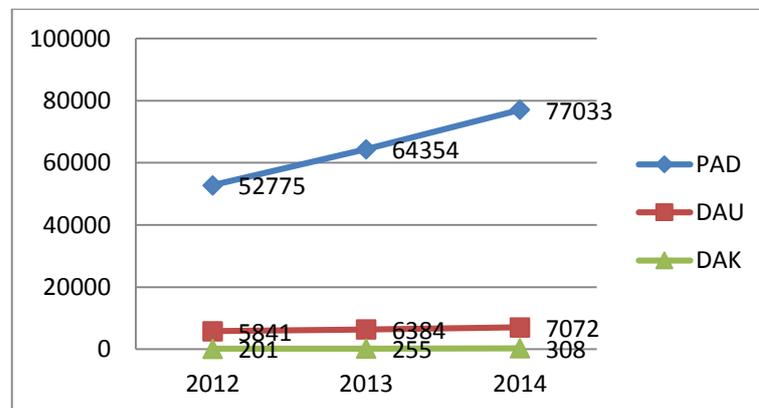
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2013) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

. Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk membangun daerah yang terlihat dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.

Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah serta lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang berarti semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Berbeda dengan penelitian lainnya, penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Rofiq (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal disebabkan karena dalam suatu daerah cenderung untuk membiayai Belanja Modal lebih banyak bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berikut disajikan grafik 1.6 mengenai PAD, DAU dan DAK se-Pulau Jawa selama tiga tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 1.6
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) se-Pulau Jawa
Tahun 2012 – 2014

Grafik 1.6 diatas menunjukkan perubahan pada PAD, DAK dan DAU. Dimana dapat dilihat bahwa PAD, DAU, dan DAK mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan PAD, DAU, dan DAK, dengan Belanja Modal. Untuk itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi empiris pada Provinsi se-Pulau Jawa Periode 2009-2014)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh pengeluaran atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja Modal sebaiknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan infrasktruktur dan aktivitas pembangunan lainnya yang berguna untuk kepentingan publik dan kelancaran tugas pemerintahan.

Pulau Jawa merupakan daerah yang penyerapan anggaran belanja modalnya masih kurang. Pulau Jawa menjadi Pusat Pemerintahan dan Perekonomian yang anggaran Belanja Modalnya setiap tahun mengalami peningkatan namun realisasi penyerapannya masih kurang dan tidak mengalami peningkatan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Realisasi Anggaran Bealanja Modal di Pulau Jawa Tahun 2009-2014?

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari variabel x:
 - a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal?
 - b. Dana Alokasi Umum terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal?
 - c. Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Realisasi Anggaran Belanja Modal di Pulau Jawa 2009-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial :
 - a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.
 - b. Dana Alokasi Umum terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.
 - c. Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat berbagai pihak, yaitu:

1.6.1 Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan menambah wawasan mengenai besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Realisasi Anggaran Belanja Modal jika dilihat dari laporan realisasi anggarannya serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Realisasi Belanja Modal.

1.6.2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dalam memanfaatkan anggaran Belanja Modal yang ada dan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Realisasi Anggaran Belanja Modal serta pengaruh antar variabel tersebut.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini akan mengkaji pengaruh secara parsial maupun simultan yang mungkin dapat mempengaruhi Belanja Modal.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Objek penelitian ini adalah Pulau Jawa. Data dalam penelitian diperoleh dari website resmi BPS (www.bps.go.id) tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan September sampai bulan Desember 2016. Fokus dalam penelitian ini adalah pada periode 2009 sampai dengan tahun 2014 karena data yang tersedia hanya sampai 2014.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas setiap bab. Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan mendukung solusi permasalahan, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisis uraian mengenai karakteristik penelitan, alat pengumpulan data, tahapan pelaksana penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknis analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian, mencakup analisis responden terhadap variabel penelitian, analisis statistik serta analisis pengaruh variabel.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran peneliti baik dari segi aspek teoritis maupun praktis.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN